

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh

EWINA RATU (1501117500)
ewina.ratu7500@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing: Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 SimpangBaruPekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program (PIP) is a cash assistance provided by the government to students from underprivileged families who have difficulty paying tuition fees. This program was created to reduce the dropout rate for children caused by economic factors. This study aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program at the elementary school level and identify the inhibiting factors in the implementation of the Smart Indonesia Program at the elementary school level in Pekanbaru city. This study uses a descriptive qualitative method and the required data, both primary and secondary data, were obtained through observation, interviews and documentation. This study uses the theory of David C. Korten which has indicators of program with beneficiaries, programs with implementing organizations, and groups of beneficiaries with implementing organizations. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Program in the city of Pekanbaru was not effective and efficient because there were still several indicators that had not been fulfilled and several phenomena were found in the field regarding the implementation of this program. Although, there were still participants who complained that there were deficiencies and that they were not fully optimal because there were several things that needed to be considered for evaluation. The inhibiting factors are information, limited organizational capacity, and the use of funds.

Keywords: *Implementation, Smart Indonesia Program, Organizations, Beneficiaries.*

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses bagi mereka guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal / Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Selain itu, Program Indonesia Pintar bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan usia 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Sejak diluncurkan, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) telah memberi banyak manfaat untuk para siswa penerima program. PIP berhasil menurunkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan walaupun belum maksimal. PIP juga disebut telah membantu meringankan beban orangtua terhadap biaya pribadi siswa untuk sekolah. Tercatat hingga Desember 2020, sebanyak Rp. 42,83 triliun telah disalurkan pemerintah melalui kemendikbud kepada para penerima PIP.

Pada tingkat Sekolah Dasar jumlah siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun 2016 ada 14.986, tahun 2017 ada 21.790 orang, tahun 2018 ada 12.150 orang, tahun 2019 ada 13.677 orang, dan tahun 2020 ada 14.560 orang yang mana data ini diperoleh dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota Pekanbaru. Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ini berjumlah 194 sekolah, secara lebih rinci nama sekolah beserta alamatnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dari 194 sekolah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap 3 sekolah yang memiliki kendala dalam proses implementasi Program Indonesia Pintar ini, yaitu SD Negeri 183 Pekanbaru, SD Negeri 164 Pekanbaru dan SD Negeri 37 Pekanbaru. Alasan penulis memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian mengenai program ini adalah ditemukannya permasalahan-permasalahan mengenai Program Indonesia Pintar ini seperti proses pendataan dan pencairan dana yang lamban dan masih ada nya siswa yang putus sekolah di sebabkan terkendala biaya. Selain itu alasan penulis memilih sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah juga dikarenakan lokasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis

untuk memperoleh data dengan cepat dan dapat menghemat biaya transportasi.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama jumlah siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun 2016 tidak diketahui dikarenakan data dari dapodik yang sudah tidak ada, tahun 2017 ada 9.992 siswa, tahun 2018 ada 10.448 siswa, tahun 2019 ada 8.494 orang, dan tahun 2020 ada 7.434 orang.

Dalam data yang didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kota Pekanbaru dengan jumlah siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang tidak mampu dalam pemberian biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat bahwa yang menerima bantuan program ini yang terbanyak ialah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk meneliti Program Indonesia Pintar ini berfokus pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar khususnya pada tahun 2020.

Beberapa alasan peneliti tertarik melakukan pengkajian masalah pada Program Indonesia Pintar (PIP) di dinas pendidikan dan kebudayaan kota Pekanbaru ditemukan fenomena-fenomena berikut :

1. Proses pendataan dan pencairan dana anggaran Program Indonesia Pintar yang lambat.
2. Banyaknya siswa miskin tidak mendapatkan Kartu Indonesia dikeluhkan para orangtua siswa dan minimnya sosialisasi dari pihak pelaksana. Ada sebanyak 317.244 data yang diusulkan ke pemerintah pusat terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar, tapi baru 220.934 kartu saja yang berhasil disalurkan kepada calon penerima bantuan.
3. Ditemukannya masalah bahwa ada 22 persen tamatan sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. dari 28.446 orang anak, ada

1.293 orang anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya pada tingkat SD maupun SMP.

4. Masih banyak anak-anak di Provinsi Riau yang putus sekolah terkendala biaya. Hingga saat ini tercatat sekitar 94 ribu anak putus sekolah dari berbagai jenjang karena keterbatasan biaya.

Dari beberapa fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar tahun 2020 di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai Program Indonesia Pintar ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar tingkat Sekolah Dasar se-kota Pekanbaru.

2.KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan

Anderson dalam **Tahir (2014:12)** mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. **Anderson** dalam **Tahir (2014:21)** mengklasifikasi kebijakan atau *policy* menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

2.3 Program

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh **Korten**. Model ini melakukan pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.

Korten menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. **Korten** menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (**Akib dan Tarigan,200:12**).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model analisis kualitatif bersifat deskriptif. Alasan peneliti memilih metode kualitatif, dimana model analisis yang digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, dan diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan atau fenomena-fenomena seperti kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program Indonesia Pintar, kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana terhadap pihak penerima program, dan penyalahgunaan dana bagi peserta yang menerima bantuan program Indonesia Pintar ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru sebagai pihak pertama yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru

3.3 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala sub bagian penyaluran Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Dasar.
2. Kepala Sekolah bagi sekolah penerima bantuan Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru.
3. Orangtua siswa penerima dan tidak menerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Sedangkan untuk menentukan informan dari siswa yang mendapatkan bantuan sosial pendidikan di Provinsi Riau menggunakan metode *snowball sampling*.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program indonesia pintar tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu/jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *In-depth interview*. *In-depth interview* dilakukan penulis terhadap key-informan dan informasi lainnya. Wawancara ini dilakukan dari tanggal 07 september 2020 sampai tanggal 25 september 2021.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan. Data dalam dokumentasi ini berupa materi audio dan visual seperti foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 07 september 2020 sampai tanggal 25 september 2021.

3.6. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik **Creswell** sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Sehingga peneliti mendapatkan hal-hal mengenai implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data yang setelah wawancara, lalu peneliti memeriksa kembali mengenai implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Data yang di dapat berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan mengenai implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Peristiwa ini melibatkan fenomena yang akan diteliti dalam implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan

kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Setelah data hasil wawancara di dapat, peneliti membuat sebuah laporan yang dideskripsikan secara mendetail implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

6. Langkah akhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan strategi mentriangulasi (triangulate). Dalam langkah akhir ini, peneliti berharap agar bisa menjawab mengenai tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui Pelaksanaan penyaluran dana program indonesia pintar di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implemetasi kebijakan program indonesia pintar di tingkat SD Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan strategi mentriangulasi (triangulate). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru.

Dalam proses implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Pekanbaru penulis memfokuskan permasalahan seperti kurang tepat sarannya dalam peneirnaan bantuan PIP, kutang sosialisasi dari pihak pelaksana terkait, hingga penyalahgunaan dana bantuan dijadikan beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Untuk membahas Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru pada tingkat Sekolah Dasar penulis meneliti dengan menggunakan teori David C.

Korten, penulis akan menjelaskan berdasarkan tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan suatu implementasi Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru di bagi menjadi beberapa bagian, indikator Impelementasi Kebijakan menurut **David C. Korten** sebagai berikut :

4.1.1 Program dengan pemanfaat.

Adanya hubungan antara Program Indonesia Pintar ini dengan pemanfaat adalah program ini ditujukan berdasar untuk memenuhi kebutuhan dari pemanfaat atau peserta calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Hubungan antara program dan pemanfaat harus baik demi terciptanya suatu program yang tepat sasaran. Dalam hal ini maksudnya ada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). dengan kata lain pihak penyelenggara Program Indonesia Pintar harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa sebagai pihak penerima program indonesia pintar ini.

Program merupakan rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Program yang dimaksudkan disini ialah Program Indonesia Pintar. Sedangkan pemanfaat merupakan turunan dari kata 'manfaat' yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Disini yang dimaksud pemanfaat adalah peserta didik calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk teknis program Indonesia pintar mengenai program dengan pemanfaat masih belum efektif. Dimana dalam indikator program Indonesia Pintar ini di

fokuskan pada apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran seperti :

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas.

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 07 september 2020 dengan kasi kesiswaan Sekolah Dasar dapat menyimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar ini sudah berjalan efektif. Di perkuat dengan adanya pembuktian berupa penurunan jumlah anak putus sekolah dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tujuan dari program ini sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menteri no 9 tahun 2018 sudah berjalan dengan baik yaitu mengenai petunjuk pelaksanaan Program indonesia Pintar bagi siswa kurang mampu di Kota Pekanbaru ini khusus jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

Akan tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar ini bahwa sasaran dan tujuan dari Program Indonesia Pintar ini masih belum berjalan dengan sempurna, dikarenakan masih banyaknya keluhan dari para orangtua siswa tentang Program Indonesia Pintar yang mana tidak ballance dengan peraturan yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2018 tentang program indonesia pintar yang berisikan tujuan dari program ini yaitu dari segi personal untuk membantu biaya pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Adanya kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam mencapai tujuan.

Dalam mewujudkan tujuan dalam Program Indonesia Pintar ini pemerintah melakukan beberapa kebijakan atau tindakan agar program ini dapat terwujud dengan baik. Yang mana dengan dibuatnya kebijakan kebijakan ini

tentunya memerlukan beberapa pihak terkait yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan Program Indonesia Pintar ini diantaranya adalah melakukan monitoring dan evaluasi.

Dari pernyataan informan dalam wawancara yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa program Indonesia Pintar ini sudah berjalan baik di kota Pekanbaru khususnya pada tingkat sekolah dasar dikarenakan seluruh pihak terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan yang mana pelaksanaan monitoring ini dapat memantau perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari Program Indonesia Pintar ini yang menjadi perumusan perencanaan Program Indonesia Pintar ini di masa yang akan datang.

c. adanya perkiraan anggaran.

Anggaran yang diberikan pemerintah tercatat lebih dari 5 milyar untuk daerah kota Pekanbaru, dimana setelah dilakukan penelitian sudah hampir sepenuhnya dana yang diberikan terimplementasi dengan tepat. Hanya saja ada beberapa kendala yang membuat dana tidak bisa turun sepenuhnya akan tetapi dana tersebut tetap ada di pihak penyalur bank, yang akan dikembalikan lagi ke pemerintah. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa dana tersebut disalah gunakan oleh pihak atau organisasi yang terlibat.

Selain itu untuk pembagian anggaran bagi penerima bantuan program ini memiliki perbedaan bagi setiap penerima nya. Hal ini dijelaskan sebagai berikut peserta didik tingkat Sekolah Dasar kelas 1 sampai kelas 3 mendapatkan bantuan sebesar Rp.225.000 sedangkan untuk tingkat sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6 mendapat bantuan sebesar Rp.450.000; perbedaan pembagian ini dibuat berdasarkan tingkat kebutuhan siswa,

semakin tinggi tingkat kelas siswa semakin besar pula jumlah yang diperlukan.

d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Strategi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini merupakan salah satu hal yang terpenting agar program ini dapat berjalan dengan semestinya. Pihak terkait sudah memiliki strategi yang baik untuk menjalankan program ini.

Dari wawancara yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak sekolah sudah mengambil langkah yang tepat yaitu dengan melakukan sosialisasi terbuka terhadap orangtua siswa calon penerima bantuan, dimulai dari penyuluhan berupa KIP (Kartu Indonesia Pintar) hingga mekanisme dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini. Diketahui bahwa siswa yang memiliki KIP adalah siswa yang pasti menerima bantuan ini, karena siswa yang memiliki KIP adalah siswa yang telah terdaftar disekolah sebagai siswa yang kurang mampu dalam segi financial yang mana sudah terlebih dahulu diseleksi oleh pihak sekolah yang di lihat dari pendapatan gaji orangtuanya.

4.1.2 Program dengan Organisasi Pelaksana

Adanya keterhubungan antara program dengan organisasi pelaksana dalam program Indonesia Pintar ini. Apabila organisasi pelaksana sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar maka kemungkinan besar program ini berjalan dengan semestinya dan sebagaimana yang diharapkan. Segala hal yang dilakukan oleh organisasi pelaksana mengenai tugas dan perannya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri No 9 tahun 2018

Organisasi pelaksana program adalah pihak yang membantu melaksanakan berjalannya program Indonesia Pintar ini. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sudah diberi tugas

dan fungsinya masing-masing sesuai yang telah dituangkan dalam peraturan mengenai juknis penyelenggaraan Program Indonesia Pintar.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 3 pihak utama dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru :

a. Pihak Pertama adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tugas dan peran dinas Kota Pekanbaru disini adalah untuk mensosialisasikan program PIP keseluruh UPTD dinas pendidikan Pekanbaru, kemudian mendorong kepala sekolah dan pimpinan kepala untuk mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menginformasikan surat keputusan (SK) melalui sekolah. Selain itu peran dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru disini juga membantu mengkoordinasikan dengan lembaga bank/penyalur untuk jadwal pencairan dana serta ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi PIP di Kota Pekanbaru sesuai petunjuk pelaksanaan dan juga bertanggung jawab dalam memonitoring dan mengevaluasi juga menangani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru.

b. Pihak kedua adalah sekolah/ lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru.

Peran dan fungsi sekolah dalam menjalankan Program Indonesia Pintar ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan. Rincian tugasnya adalah pihak sekolah tingkat Sekolah Dasar Pekanbaru wajib mensosialisasikan dan mengkoordinasikan dalam Program Indonesia Pintar ke seluruh warga sekolah, dan kemudian wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah dari usia 6-21 tahun sebagai calon pesertanya, lalu mengidentifikasi peserta didik

yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mengupdate ke dalam aplikasi Dapodik, lalu menyeleksi dan mengusulkan data siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar ke dinas pendidikan Kota Pekanbaru, setelah itu pihak sekolah menyampaikan informasi kepada siswa penerima bantuan apabila dana Program Indonesia Pintar ini sudah siap diambil, selain itu pihak sekolah juga bertanggung jawab dalam memonitoring proses pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank/ lembaga penyalur yang telah ditetapkan.

Dari wawancara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa dari pihak sekolah atau pihak kedua belum secara efektif menyampaikan dan mensosialisasikan mengenai program ini kepada para orang tua siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Adanya ketidaktransparan informasi membuat para orangtua tidak memahami mekanisme yang benar untuk mengikuti program, sehingga proses pengimplementasian program Indonesia ini dirasa belum efisien bagi para orangtua siswa calon penerima Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru ini terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Selain itu pihak sekolah juga kurang cekatan dalam mengelola data dan memproses pengusulan data bagi siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar ini kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sehingga memperlambat dari proses Program Indonesia Pintar ini. Sehingga masih banyak keluhan yang ditimbulkan dikarenakan kurang cekatannya pihak sekolah dalam memproses bantuan ini, dimana seharusnya sebagai pihak kedua atau sebagai sarana menjalankan program ini pihak sekolah seharusnya memiliki etos kerja yang mumpuni dan bekerja secara cepat agar program Indonesia Pintar ini dapat berjalan dengan

semestinya di Kota Pekanbaru khususnya pada tingkat Sekolah Dasar.

c. Pihak ketiga yang memiliki peran penting dalam pengimplementasian program ini adalah lembaga penyalur.

Dimana peran dari lembaga penyalur dari Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru ini adalah menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar sesuai dengan keputusan peserta didik yang telah disetujui direktorat teknis terkait lalu memberitahukan kepada siswa penerima melalui pihak sekolah bahwa dana sudah cair, juga menetapkan jadwal pencairan dan membuat laporan berkala sebagai bukti dana sudah cair, dan yang terpenting memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana. Terutama bagi dana yang tidak berhasil dicairkan pihak lembaga penyalur wajib mengembalikan dana tersebut kepada Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang sudah berlaku.

4.1.3 Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana.

Adanya suatu kelompok sasaran atau kelompok pemanfaat dalam suatu program harus jelas. Seperti Program Indonesia Pintar ini, sudah ditetapkan nya kelompok pemnafaat yang telah tertuang jurnal pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Setiap kelompok pemanfaat memiliki hak yang sama dalam menerima bantuan program ini. Apabila sudah tepat sasaran antara program dengan kelompok pemanfaat atau sudah dirasakannya manfaat dari program tersebut maka dapat di pastikan program tersebut sudah berjalan dengan baik pelaksanaannya. Dalam program Indonesia Pintar tingkat sekolah dasar di Kota Pekanbaru saat ini penulis mengetahui ada beberapa sasaran kelompok yang menjadi syarat utama dalam mendapatkan bantuan ini. Seperti peserta didik yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), peserta didik dari

keluarga miskin atau rentan miskin, atau yang juga berstatus yatim piatu, yatim/piatu, peserta didik yang memegang kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan peserta didik yang terdaftar dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (PKS).

4.2 Faktor- Faktor yang Menghambat Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru.

Adapun faktor yang menjadi penghambat ialah sebagai berikut:

4.2.1 Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi dan informasi yang di berikan pihak sekolah terhadap siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar ini mulai dari sosialisai, pendataan calon siswa penerima bantuan, mengenai aspek persyaratan, hingga pengumuman mengenai pencairan dana bantuan belum di upayakan secara optimal oleh pihak sekolah yang menjadi jembatan dalam menjalankan Program Indonesia Pintar ini bagi peserta didik yang tidak mampu sehingga manfaat dari program ini belum maksimal di rasakan oleh peserta didik calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar ini.

4.2.2 Keterbatasan Kemampuan Organisasi.

Hasil keseluruhan wawancara yang di tuangkan dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di kota Pekanbaru melalui beberapa faktor penghambat yang disimpulkan informasi yang diberikan kepada pihak dinas dari pihak sekolah terkait mengenai pengiriman data dari calon penerima bantuan, syarat-syarat hingga proses seleksi, dan juga informasi mengenai waktu pencairan dana belum optimal dan belum berjalan dengan baik. Selain itu pihak sekolah dan pihak dinas pendidikan juga masih kurang dalam melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan implementasi Program Indonesia Pintar ini, sehingga harus meninjau ulang dalam peraturan yang ada maupun yang telah ditetapkan untuk pembagian tugas dan peran yang lebih spesifik lagi guna memecahkan kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru ini.

4.2.3 Penggunaan Dana

Penggunaan dana yang dimaksud ialah para siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar ini harus melaporkan hasil penggunaan dana agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sebagai mana mestinya untuk keperluan pendidikan karena bisa saja dana yang diberikan salah digunakan, seperti digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pribadi bukan untuk keperluan sekolah. Hal ini lah yang menjadikan dana anggaran yang sudah diberikan kepada peserta didik penerima bantuan menjadi tidak tepat nilai manfaat dan kegunaannya sehingga sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari peraturan pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini yang berkaitan dengan pemanfaatannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa masih banyak nya pihak penerima program tidak menggunakan dana atau anggaran yang diberikan dengan semestinya. Banyak yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari.

4.2.4 Politis

Adanya kepentingan politis dalam implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru juga menimbulkan beberapa permasalahan. Ditemukan adanya pemangku kepentingan yang menggunakan wewenangnya untuk menjalankan program ini dengan tidak sesuai dengan juknis/juklak yang telah

ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018. Dikarenakan hal inilah menimbulkan berbagai komplain dari orangtua siswa yang mengklaim bahwa anaknya lah yang berhak menerima bantuan karena kurang mampu tetapi pada kenyataannya tidak merasakan manfaat dari program Indonesia Pintar ini.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih adanya kepentingan politis dari pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program Indonesia Pintar ini. Diketahui dari beberapa laporan bahwa adanya siswa yang disinyalir mampu malah mendapatkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik yang kurang atau tidak mampu. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan calon penerima bantuan juga memberikan masalah baru dalam implementasi Program Indonesia Pintar ini terkhusus di Kota Pekanbaru.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di kota Pekanbaru belum optimal, hal ini disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan masih tidak sesuai dengan kriteria yang menjadi ukuran dan tujuan program yang telah ditetapkan.
2. Tidak optimalnya hal tersebut disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian Program Indonesia Pintar ini meliputi kesalahan dalam menyampaikan dan menerima informasi, tidak tepatnya dalam penggunaan dana bantuan, keterbatasan kemampuan dari organisasi pelaksana, dan masih

adanya kepentingan-kepentingan politis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru dalam proses monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan penambahan tim dan lebih memberikan pembagian spesifik tugas yang jelas dari masing-masing pihak yang erlibat serta lebih ditingkatkan lagi kinerja dan dipercepat dalam pelaksanaannya sehingga target sasaran terpenuhi dengan tepat pada waktu yang telah ditetapkan dinas terkait yang sudah melakukan permohonan segera cepat di proses datanya dan dilakukan survey secara detail guna menghindari tidak tepat sasarnya pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini. Sebaiknya juga dalam proses kinerja para pelaksana hibah bidang pendidikan ini lebih ditingkatkan lagi melalui diadakannya pelatihan terkait mekanisme program ini.
2. Pada faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini dimana komunikasi antar dinas pendidikan terhadap pihak sekolah yang terkait harus lebih transparan lagi dan lebih ditingkatkan mengenai kejelasan dan kepastian penerimaan bantuan program ini untuk peserta didik juga melakukan sosialisasi yang spesifik tentang mekanisme program ini terhadap para calon penerima bantuan program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, Carl Friedrich (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. (2004). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (1-4 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, Charles O. (2012). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya Bandung.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muzzamil, As'ad. (2016). *Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru*. Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Ismail. (2007). *Public Policy*. Surabaya: PMN
- Novianti, Ivana Asthari. (2015). *Kebijakan Pengelolaan Tarif Pelabuhan Terminal Khusus PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai*. Skripsi. Pekanbaru: Unri.
- Nugroho. (2003). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Purwanto, Agus B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara (Studi di Kabupaten Sambas)*.
- Rohman, Arif. (2009). *Implementasi Kebijakan Program*. Jakarta : Selemba Empat
- Siagian. 1994. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung: Alfa Beta.
- Sujianto.(2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tahir, Anderson. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab. Solihin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- As'ari, Hasim. (2019). *Implementasi Kebijakan Kehutanan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Jurnal:**
- Azizah, Nur. 2021. Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Bone. Bone.
- Putri, Dian Marisa. 2018. Kualitas Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
- Retnaningsih, Hartini. 2017. Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Lupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan). Sumatera Selatan.
- Sarah, Arianne. 2017. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan.
- Safira, Ira. 2017. Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Batuk Utara Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung.
- Sugiyasari, Agus Setyani. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 di SMAN 11 Yogyakarta. Yogyakarta.
- Dokumen Lainnya:**
- Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar